

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Rm.id
Media Cetak	

Pemprov DKI Siap Realisasikan Program Sekolah Swasta Gratis

Reporter : SUSILO YEKTI

Editor : ABDUL SHOMAD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI **Jakarta** memastikan akan mengeksekusi program sekolah swasta gratis tahun depan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah mengetuk palu alokasi anggaran untuk program tersebut.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, **Khoirudin** menyampaikan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang disahkan, Kamis (28/11/2024), alokasi anggaran untuk sekolah negeri dan swasta gratis Rp 2,3 triliun. Saat ini, kata dia, yang ditunggu masyarakat ialah regulasi tentang pelaksanaan sekolah gratis, baik swasta dan negeri.

"Yang perlu waktu adalah persiapan regulasinya. Dananya sudah siap. Kita sudah sepakat sesama eksekutif juga nggak ada masalah," ujar Khoirudin dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (1/12/2024).

Politisi PKS ini menambahkan, perumusan regulasi dari kebijakan sekolah swasta hingga negeri gratis diproyeksikan tidak akan lama. Menurutnya, eksekutif dan DPRD cukup merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, agar program sekolah swasta gratis memiliki dasar hukum yang kuat.

"Tujuannya, kualitas pendidikan di DKI Jakarta memiliki kualitas yang sama, baik negeri maupun swasta. Mudah mudahan regulasinya bisa cepat selesai, sehingga Juli 2025 bisa dilaksanakan," harap Khoirudin.

Dia juga memastikan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengakomodir tambahan biaya sekolah. Seperti seragam sekolah, sepatu, topi, dan peralatan sekolah lainnya.

"Sebenarnya, komponen KJP itu untuk biaya sekolah. Sekarang sekolahnya udah gratis. Jadi, KJP hanya untuk beli sepatu, kaos kaki, celana, baju, topi, dasi dan perlengkapan sekolah lainnya," pungkas Khoirudin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan, program sekolah swasta gratis tidak hanya bebas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran, tapu juga kebutuhan peralatan peserta didik.

Kemudian, lanjut dia, biaya kegiatan pembelajaran sesuai tarif tertentu berdasarkan hasil kajian. "Selain itu pemenuhan dasar pendidikan untuk peserta didik berupa seragam, sepatu, tas, dan alat tulis yang diperlukan," imbuhnya.

Meski demikian, kata Purwosusilo, Pemerintah tidak akan menggratiskan semua sekolah swasta di Jakarta. Dia menjelaskan sekolah-sekolah swasta di Jakarta telah dipetakan berdasarkan kualitas dan biaya. Tingkatan atau klaster dari sekolah-sekolah swasta dikelompokkan menjadi klaster 1 hingga klaster 5.

Dia menuturkan sekolah swasta yang akan menjadi target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3. Sedangkan klaster 4 dan klaster 5, dinilai sebagai sekolah swasta elite tidak termasuk dalam program ini.

Purwosusilo menambahkan, dari sekolah swasta yang menjadi target, terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk masuk dalam program sekolah gratis. "Kriteria sekolah swasta yang menjadi target sekolah gratis antara lain bersedia bekerja sama dengan pemerintah dalam program sekolah gratis. Lalu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat selama 3 tahun terakhir tanpa terputus," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal berharap, langkah yang dilakukan Pemprov DKI bisa ditiru oleh daerah lain. Politisi PKB itu menilai, program sekolah gratis adalah wujud kehadiran negara dan sesuai dengan amanat UUD 1945.

"Itu bentuk kehadiran negara. Saya sangat setuju kalau Pemda DKI menjadi rujukan semua Pemerintah Daerah, yang punya tanggung jawab mandatory spending dari anggaran pendidikan 20 persen, itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Di media sosial X, program sekolah swasta gratis yang digagas Pemprov DKI menuai beragam komentar dari warganet. "Programnya ada, anggarannya ada. Tinggal Gubernurnya nih yang belum ada heheh," kelakar akun *@Prambudi55434*. "Siap-siap saja DKI bakal kebanjiran warga dadakan karena ada program sekolah swasta gratis," cuit akun *@nabilaah_quenza*.

Sementara itu, akun *@emmkenjeremy* berharap, program sekolah gratis di Jakarta, baik swasta dan negeri, bisa diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kalau di Jakarta bisa, harusnya di IKN anak-anak ASN yang pindah juga dapat sekolah gratis. Ya lumayan seandainya ada yayasan swasta kayak Al Azhar di IKN, kan anak-anak bisa sekolah disana tanpa biaya," ucapnya.

Akun *@murtalihanza* meminta Pemprov DKI tak hanya menggratiskan sekolah. Selain pendidikan, tolong transportasi umum bagi warga DKI juga digratiskan. Ini juga penting, Pak. Biar nggak macet," cuitnya.